

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.;
- *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan Pertama, Konstitusi, Press, Jakarta, 2006.*;
- *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, UII Press, Jakarta, 2007;
- Bagir Manan, “*DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*”, FH-UII Press, Yogyakarta, 2005;
- Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987;
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997;
- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993;
- Darji Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991;
- David N. Obson, *The Legislative Process, A Comparative Approach*, Harper & Raw Publication, New York, 1980;
- Firmansyah Arifin, dkk., *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, (KRHN), Jakarta, 2005;
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media Cet ke-2, Bandung, 2007;
- Imin Napitupulu, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, PT. Alumni, Bandung, 2007;
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989;
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1997;

- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008;
- Mahmuddin Muslim, *Jalan Penunjang Menuju KPTPK*, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK), Indonesia, Jakarta, 2004;
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1997;
- Manullang M, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995;
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981;
- Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990;
- Satya arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*, Pusat Studi Hukum FH UI, Jakarta, 2007;
- Saiful Anwar., *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004;
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, 1986;
- Sukarno K. *Dasar-Dasar Manajemen*, Miswar, Jakarta, 1992;
- Tjipta Lesmana, *Quo Vadis, Dewan Perwakilan Daerah*, Jakarta : Kompas, 2006;

## **B. Undang-Undang**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999 - Keempat 2002 ), Sinar Grafika, Jakarta, 2002;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, Dan DPRD;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### C. Sumber Lain

Mulyana Wirakusumah, Nazaruddin Sjamsuddin, dkk., dan Capt. Tarcisius Walla, (Para pemohon pengujian Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Negara RI Tahun 1945), yang menilai *KPK sebagai lembaga ekstrakonstitusional karena telah mengambil alih kewenangan lembaga lain yang diperoleh dari UUD Negara RI Tahun 1945 yang sebetulnya telah terbagi habis dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif*. Putusan MK RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta: Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2003;

Brian A Garner, *Black law dictionary*, west group, 2009;

Soren Davidsen, Vishnu Juwono, dan David G. Timberman, *Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006: Sebuah Survei tentang Berbagai Kebijakan dan Pendekatan pada Tingkat Nasional*, (Jakarta dan Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies dan The United States-Indonesia Society, 2007).

FORMAPPI, *Meghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan*, FORMAPPI, Jakarta, 2009;

Rifin Sari Surunganlan Tambunan, *fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut UUD 1945 Suatu Studi Analisis Mengenai Pengaturannya Tahun 1966-1997*, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, 1998;

Update Indonesia (*Tinjauan Bulanan, Ekonomi, Hukum, Keamanan Politik Dan Social*), Volume XI, No. 5 – Mei, Juni 2017 ISSN 1979-1984;